

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 4 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN  
 TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DAFTAR PELAYANAN

KODE SP	UNIT TEKNIS	JENIS PELAYANAN
<b>I</b>		<b>DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG</b>
I.A		PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA (PEMERINTAH DAERAH)
I.B		PENYEDIAAN INFORMASI TATA RUANG
<b>II</b>		<b>DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN</b>
II.A		PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL
II.A.1		PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (PELIMPAHAN KEPADA KANTOR WILAYAH BPN)
II.A.2		PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (PUSAT)
II.B		PENGUKURAN UNTUK MENGETAHUI LUAS
II.C		PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA HARIAN
II.D		PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA BULANAN
II.E		PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA TAHUNAN
II.F		PEMETAAN TEMATIK KAWASAN 1:25.000
II.G		PEMETAAN TEMATIK KAWASAN 1:10.000
II.H		PENDAFTARAN UJIAN SURVEYOR KADASTER BERLISENSI
II.I		PELAKSANAAN UJIAN SURVEYOR KADASTER BERLISENSI
II.J		PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTER BERLISENSI
II.K		PENDAFTARAN KANTOR JASA SURVEYOR KADASTER BERLISENSI (KJSKB)
II.L		PELAYANAN INFORMASI TITIK KOORDINAT
II.M		PETA SAMPAI DENGAN SKALA 1:5.000 (MINIMAL 25 HEKTAR)
<b>III</b>		<b>DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN</b>
III.A		PERMOHONAN SK PEMBERIAN HGU, HGB, HP, HM (BADAN HUKUM)
III.A.1		PEMBERIAN HGU (BADAN HUKUM)
III.A.2		PEMBERIAN HGB/HP/HM (BADAN HUKUM)
III.A.3		PEMBERIAN HGB/HP/HM (PERORANGAN)
III.B		PERMOHONAN SK PERPANJANGAN JANGKA WAKTU/PEMBAHARUAN HGU, HGB, HP (BADAN HUKUM)
III.B.1		PERPANJANGAN JANGKA WAKTU/PEMBAHARUAN HGU (BADAN HUKUM)
III.B.2		PERPANJANGAN JANGKA WAKTU/PEMBAHARUAN HGB/HP
III.C		PERMOHONAN SK P3MB/PRK5
III.C.1		IZIN PEMBELIAN RUMAH/BANGUNAN OBJEK P3MB/PRK.5 (PERORANGAN/INSTANSI PEMERINTAH)
III.C.2		KEPUTUSAN PENJUALAN RUMAH/BANGUNAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OBJEK P3MB/PRK.5 (PERORANGAN/INSTANSI PEMERINTAH)
III.D		IZIN PERALIHAN HGU, HGB (BADAN HUKUM)
III.E		IZIN PELEPASAN SEBAGIAN HGU, HGB (BADAN HUKUM)
III.F		IZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN/KOMODITAS
III.G		IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN
III.H		SK PENUNJUKAN BADAN HUKUM TERTENTU (KEAGAMAAN DAN SOSIAL) UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK
III.I		PENDAFTARAN UJIAN PPAT
III.J		PELAKSANAAN UJIAN PPAT

III.K	PENINGKATAN KUALITAS PPAT
III.L	PEMBERIAN CUTI PPAT (DIATAS 6 BULAN)
III.M	PEMBERHENTIAN SEMENTARA PPAT
III.N	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PPAT
III.O	PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PPAT
III.P	SALINAN SK PENGANGKATAN PPAT
III.Q	PERUBAHAN DATA PPAT
III.R	PERPANJANGAN MASA JABATAN PPAT
III.S	PENGANGKATAN PERTAMA KALI PPAT
III.T	PENGANGKATAN KEMBALI PPAT
<b>IV</b>	<b>DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA</b>
IV.A	PETA ANALISIS PENATAGUNAAN TANAH HITAM PUTIH.
IV.B	PETA ANALISIS PENATAGUNAAN TANAH KERTAS BERWARNA.
IV.C	DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA $\leq 1 : 10.000$ .
IV.D	DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA $1 : 10.000 - 1 : 50.000$
IV.E	DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA $1 : 50.000 - 1 : 100.000$
IV.F	DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA $> 1 : 100.000$ .
IV.G	PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
IV.H	PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TANAH PARTIKELIR
IV.I	PENGELUARAN TANAH DARI OBYEK LANDREFORM PADA LOKASI TOL YANG BELUM PERNAH DIREDISTRIBUSIKAN
<b>V</b>	<b>DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH.</b>
V.A	PERMOHONAN SK HGU, HGB, HP (BUMN) DAN HPL (INSTANSI PEMERINTAH)
V.B	PERMOHONAN SK PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN HGU, HGB, HP (BUMN)
V.C	IZIN PERALIHAN HGU, HGB (BUMN)
V.D	PEMETAAN ZONA NILAI TANAH BERBASIS BIDANG SKALA $1 : 5000$
V.E	PEMETAAN ZONA NILAI TANAH DAN ZONA NILAI EKONOMI KAWASAN SKALA $1:10.000$
V.F	PEMETAAN ZONA NILAI TANAH DAN ZONA NILAI EKONOMI KAWASAN SKALA $1:25.000$
V.G	NILAI TANAH ATAU NILAI ASET PROPERTI
V.H	ZONASI NILAI TANAH (MINIMUM 50 HEKTAR)
V.I	NILAI EKONOMI KAWASAN (MINIMUM 50 HEKTAR)
V.J	NILAI ASET KAWASAN (MINIMUM 50 HEKTAR)
V.K	PENDAFTARAN PENILAI TANAH
<b>VI</b>	<b>DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH</b>
VI.A	REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG DALAM RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RTR KSN) (PEMERINTAH DAERAH)
<b>VII</b>	<b>DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PERTANAHAN DAN PEMANFATAN RUANG.</b>
VII.A	PEMBATALAN HAK ATAS TANAH
VII.A.1	PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI/ KESALAHAN PROSEDUR
VII.A.2	PEMBATALAN HAK ATAS TANAH GUNA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
VII.B	PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TERLANTAR
VII.C	GELAR/PAPARAN KASUS
VII.D	PENANGANAN PENGADUAN PERTANAHAN
VII.D.1	PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK TANAH DAN RUANG
VII.D.2	PENANGANAN PERKARA TANAH DAN RUANG (PENERBITAN SURAT KUASA)
VII.D.3	PENANGANAN PERKARA TANAH DAN RUANG (BERACARA DI PENGADILAN)
VII.E	MEDIASI KASUS PERTANAHAN